



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 062/SK/ BAN-PT

**Pengimplementasian Asistensi Militer dalam Kebijakan
Afghanistan Freedom Support di Afghanistan Sebagai
Upaya Peredaman Pergerakan Insurgensi Taliban Pada
Tahun 2003-2006**

Skripsi

Oleh
Mardika Parama
2014330108

Bandung
2018



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A
SK BAN-PT NO: 062/SK/ BAN-PT*

**Pengimplementasian Asistensi Militer dalam Kebijakan
Afghanistan Freedom Support di Afghanistan Sebagai
Upaya Peredaman Pergerakan Insurgensi Taliban Pada
Tahun 2003-2006**

Skripsi

Oleh
Mardika Parama
2014330108

Pembimbing
Dr. I Nyoman Sudira, M.Si

Bandung
2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Mardika Parama
Nomor Pokok : 2014330108
Judul : Pengimplementasian Asistensi Militer dalam Kebijakan Afghanistan
Freedom Support di Afghanistan Sebagai Upaya Peredaman
Pergerakan Insurgensi Taliban Pada Tahun 2003-2006

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 19 Oktober 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

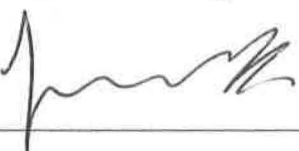
Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira


: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mardika Parama

NPM : 2014330108

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Pengimplementasian Asistensi Militer dalam Kebijakan Afghanistan
Freedom Support di Afghanistan Sebagai Upaya Peredaman Pergerakan Insurgensi
Taliban Pada Tahun 2003-2006

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 November 2018



Mardika Parama
(2014330108)

Abstrak

Nama : Mardika Parama
NPM : 2014330108
Judul : Pengimplementasian Asistensi Militer dalam Kebijakan Afghanistan Freedom Support di Afghanistan Sebagai Upaya Peredaman Pergerakan Insurgensi Taliban Pada Tahun 2003-2006

Invasi Amerika Serikat (AS) pada tahun 2001 memulai sejarah panjang intervensi AS di Afghanistan. Pada tahun 2002 – 2006, pemerintahan AS membentuk kebijakan untuk membangun negara yang baru saja berdiri pasca rezim Taliban, yang bernama *Afghanistan Freedom Support Act*. Bantuan berbentuk dana, logistik, infrastruktur dan pelatihan diberikan oleh pemerintahan AS kepada pemerintahan RIA agar tercipta keamanan dan stabilitas di Afghanistan. Di sisi lain, kelompok Taliban kembali mengancam keamanan Afghanistan dengan melancarkan serangan-serangan ke wilayah RIA. Konflik insurgensi antara RIA dengan Taliban pun terjadi, dengan AS sebagai pihak ketiga yang memberikan asistensi militer kepada RIA untuk melawan Taliban. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang muncul dalam karya tulis ini adalah, **“Bagaimana implementasi asistensi militer Amerika Serikat terhadap Republik Islam Afghanistan pada kebijakan Afghanistan Freedom Support Act dalam meredam pergerakan insurgensi Taliban di Afghanistan?”**.

Perkembangan kapabilitas militer dapat dijelaskan melalui konsep kapabilitas militer yang dikembangkan oleh *Ashley J. Tellis*, dan peran asistensi militer dapat dijelaskan melalui konsep asistensi militer oleh *John Hartmand*. Realisme Klasik, Perang Insurgensi dan Kontrainsurgensi juga dijadikan teori acuan yang membantu penelitian. Penulis menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data secara studi pustaka, yang ditunjang dengan konsep sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Analisa dalam penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Yang pertama adalah terjadi peningkatan pada kapabilitas militer angkatan bersenjata RIA sejak tahun 2002-2006. Dan yang kedua, terjadi peningkatan pergerakan insurgensi Taliban di Afghanistan. Peningkatan serangan insurgen di wilayah RIA terjadi karena peningkatan yang terjadi pada kapabilitas militer RIA tidak cukup untuk meredam ancaman-ancaman yang ada di wilayah Afghanistan. Yang kedua, sesuai dengan teori kontrainsurgensi *David Galula*, pergerakan Taliban meningkat karena buruknya citra pemerintahan di masyarakat yang mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan mereka terhadap Taliban dibandingkan pemerintahan RIA.

Kata Kunci: Afghanistan, Amerika Serikat, Taliban, Asistensi Militer, Insurgensi

Abstract

Name : Mardika Parama
 Student ID : 2014330108
 Title : Military Assistance Implementation under Afghanistan Freedom Support Act Policy on Afghanistan to Counter Taliban's Insurgency Advancement in 2003 – 2006.

*United States invasion in 2001 started a long history of its military intervention in Afghanistan. The Islamic Republic of Afghanistan (IRA). During 2003 – 2006, US government established and ran a policy to rebuilt post-Taliban Afghanistan which called Afghanistan Freedom Support Act. Budget, logistical, infrastructure, and training assistance were given by the US government towards IRA's government so they would be able to create stability and safety in Afghanistan. On the other hand, Taliban insurgent group re-emerged and threaten the security of Afghanistan with their attacks towards IRA's territory. Insurgency warfare between IRA and Taliban then occurred, with US as the third party that actively support IRA with military assistance to combat Taliban. Based on those background, the question that asked on this research are, **"How does the implementation of United States military assistance towards Islamic Republic of Afghanistan under the Afghanistan Freedom Support Act Policy to counter the advancement of Taliban insurgency in Afghanistan?"***

The growth of military capability could be explained by Ashely J. Tellis concept of military capability, combined with John Hartmand's concept on military assistance that could give explanation on the role of military assistance. Classical Realism, Insurgency Warfare, alongside with Counterinsurgency would also become researcher's reference to help the research. In order to answer the research questions in structure and detail, the authors use qualitative methods with data collection and literature study while composing this paper. The data collected will also be completed by the concepts and theories to answer the research question.

The analysis on this research resulted in two main findings. The first one is there were an improvement on IRA's armed forces military capabilities during 2002-2006 period. The second findings is there were also escalation of Taliban's insurgency activity in Afghanistan. The increase of attacks on IRA happened due to the threat that must be addressed by IRA's armed forces is greater than the improvement that occurred on the IRA's armed forces bodies. Moreover, according to the David Galula's counterinsurgency theory, the Taliban movement could strived due to the IRA's government notoriously corrupt and incapable image between Afghan people. It led to the locals to seek protection, and by doing so, helping the Taliban movement.

Keywords: Afghanistan, United States, Taliban, Military Assistance, Insurgency.

Kata Pengantar

"It has been a long and hard fight and we have lost. The severity of the defeat and the circumstances of it, however, would seem to call for a reassessment of the policies of niggardly half-measures which have characterized much of our participation here despite the commitment of manpower and resources, which were certainly generous. Those who fail to learn from history are forced to repeat it. Let us hope that we will not have another Vietnam experience and that we have learned our lesson. Saigon signing off."

– Informasi Terakhir dikirim oleh C.I.A dari Vietnam. Saigon, 1975.

26 Tahun setelah perang Vietnam berakhir, Amerika Serikat kembali terlibat dalam konflik insurgensi berkepanjangan di wilayah Afghanistan yang berlangsung hingga skripsi ini ditulis. Konflik Afghanistan melampaui lamanya Perang Vietnam yang berakhir dengan kekalahan pihak Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Meskipun konflik Vietnam dan Afghanistan merupakan dua hal yang jauh berbeda, namun kedua konflik tersebut memiliki kesamaan yaitu korban yang terus menumpuk bersamaan dengan berjalannya konflik.

Secara pribadi, penulis memiliki minat yang sangat besar untuk meneliti perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Penulis merasa adanya sebuah anomali dalam konflik Afghanistan dimana negara dengan kekuatan militer terbesar didunia terlibat konflik selama belasan tahun dengan sekelompok insurgen. Berangkat dari anomali tersebutlah peneliti menyusun skripsi ini. Skripsi ini berisi mengenai implementasi kebijakan asistensi militer Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan hasil yang didapat oleh asistensi tersebut.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, *Pengimplementasian Asistensi Militer dalam Kebijakan Afghanistan Freedom Support di Afghanistan Sebagai Upaya Peredaman Pergerakan Insurgensi Taliban Pada Tahun 2003-2006*. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada kepada:

1. Mas Dr. I Nyoman Sudira, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga Penulis, Ma, Pa, dan Kaka yang selalu mencurahkan kasih sayang mereka kepada penulis, hingga penulis dapat *survive* hingga saat ini.
3. Penghuni Bukit Jarian 21 beserta jajarannya. Umbu, Niel, Jipan, Wahyu, Maseng, dan teman-teman lainnya. Terima kasih telah memberikan dukungan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian.
4. *I would also like to give my highest gratitude to the Security Unit and Political Section of US Embassy Jakarta for their help with my thesis. For security reason I couldn't name you all in here, but I want to thank to each and every one of you for everything.*
5. Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nadyara Nafisa Sekarpuri. Sahabat dan pasangan hidup penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
1.2.1 Pembatasan Masalah	11
1.2.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	13
1.4 KAJIAN LITERATUR.....	14
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN	17
1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	35
1.6.1 Metode Penelitian	35
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	35
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	36
2. ASISTENSI MILITER AMERIKA SERIKAT KEPADA AFGHANISTAN	39
2.1 Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Afghanistan	39
2.2 Pemrioritasan Aspek Militer Dalam Kepentingan Nasional AS.....	44
2.2.1 Asistensi Militer dalam Afghanistan Freedom Support Act	48

2.3 Pembangunan Kapabilitas Militer Republik Islam Afghanistan oleh Amerika Serikat	50
2.3.1 Pemberian Dana, Logistik, dan Pembangunan Infrastruktur Militer	51
2.3.2 Pemberian Jasa Konsultasi Militer.....	57
2.3.3 Penempatan Pasukan Tempur dan Non-Tempur di Afghanistan.....	60
3. PERKEMBANGAN KAPABILITAS MILITER AFGHANISTAN NATIONAL DEFENSE FORCES DAN DINAMIKA KONTRAINSURGENSI MELAWAN TALIBAN	63
3.1 Proses Perkembangan Afghanistan National Defense Forces (ANDSF).....	64
3.2 Dinamika Perlawanan Insurgensi Taliban	83
3.2.1 Pergerakan Insurgensi Taliban dan Pelaksanaan Kontrainsurgensi oleh ANDSF di Afganistan dari Tahun 2002-2006.....	83
3.2.1.1 Pergerakan Insurgensi Taliban Tahun 2002-2006.....	83
3.2.1.2 Pelaksanaan Kontrainsurgensi oleh ANDSF di Afganistan dari Tahun 2002-2006.....	92
3.3 Pencapaian Kepentingan Amerika Serikat di Afghanistan	105
3.3.1 Penentuan Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Afghanistan ...	106
3.3.2 Pembentukan Strategi dan Kebijakan untuk Mencapai Kepentingan Nasional.....	107
3.3.3 Pencapaian Kepentingan Nasional Melalui Implementasi Kebijakan AFSA	109
3.3.4 Perubahan Kepentingan Nasional Amerika Serikat dan Implikasinya Terhadap AFSA.....	111
4. KESIMPULAN.....	116
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR GAMBAR

Grafik 2.1: Peningkatan Dana yang Dikeluarkan AS untuk OEF dan Aghanistan	51
Tabel 2.1: Pengeluaran pemerintahan AS untuk beberapa program pengamanan dan stabilisasi RIA.	53
Tabel 2.2: Bantuan logistik pertahanan pemerintahan AS kepada Afghanistan	54
Grafik 2.2: Jumlah personel ANA dari tahun 2003-2006.	58
Tabel 2.3: Jumlah Rekrutmen Tentara Nasional Afghanistan periode 2003-2004 hingga 2006-2007	59
Grafik 2.3: Jumlah tentara AS dalam Operasi <i>Enduring Freedom</i> pada tahun 2003-2006... 61	61
Grafik 3.1: Jumlah personel ANA dari tahun 2003-2006.	64
Tabel 3.1: Jumlah Hibah Peralatan Tempur ANDSF dan Personnel ANA	69
Grafik 3.2: Perbandingan alokasi dana operasi militer AS di Iraq dan Afghanistan pada tahun finansial 2003-2006.	79
Peta 3.1: Peta presensi pemerintahan bayangan Taliban di RIA pada tahun 2005 – 2007... 84	84
Peta 3.2: Peta perbandingan serangan berdasarkan wilayah pada tahun 2005 dan 2007	100

DAFTAR SINGKATAN

ANA: *Afghanistan National Army*

ANDSF: *Afghanistan National Defense Forces*

AS: Amerika Serikat

AFSA: *Afghanistan Freedom Support Act*

AFSSA: *Afghanistan Freedom and Security Support Act*

EDA: *Excess Defense Article*

GWOT: *Global War on Terror*

HAM: Hak Asasi Manusia

IMET: *International Military Education and Training*

ISAF: *International Security Assistance Forces*

NATO: *North Atlantic Treaty Organization*

NSS: *National Security Strategy*

OEF: *Operation Enduring Freedom*

RIA: Republik Islam Afghanistan

WMD: *Weapons of Mass Destruction*

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Taliban merupakan sebuah gerakan revolusioner yang menolak eksistensi Republik Islam Afghanistan (RIA). Gerakan ini berfokus pada tujuannya untuk membangun *Islamic Emirate of Afghanistan*.¹ Semenjak dilancarkannya operasi militer “*Operation Enduring Freedom*” oleh Amerika Serikat (AS) pada era kepresidenan George W. Bush tahun 2001, Taliban yang awalnya merupakan pemerintahan *de facto* dari Emirat Islam Afghanistan tersingkir dari pemerintahan dan menarik mundur pasukannya dari wilayah Afghanistan ke perbatasan Pakistan. Namun, Taliban tetap menjalankan operasi-operasi pemberontakan dan insurgensi di wilayah Afghanistan untuk mengembalikan *Emirat* yang sempat berdiri dari tahun 1996 hingga tahun 2001.

Republik Islam Afghanistan bersama dengan *International Security Assistance Force (ISAF)* yang dimotori oleh *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* terus berupaya mengalahkan Taliban dengan berbagai kebijakan dan operasi kontra-insurgensi. Hingga akhir era kepemimpinan Presiden Barrack Obama, Taliban tetap menunjukkan eksistensinya di Afghanistan dan bahkan berhasil menguasai penuh beberapa wilayah di Afghanistan.

¹ Gilles Dorronsoro, *The Taliban's Winning Strategy in Afghanistan*, (Carnegie Endowment for International Peace, 2009), hlm.6

Secara historis, Taliban berasal dari kata *Talib* yang berarti murid telah hadir di Afghanistan jauh sebelum pendudukan Soviet. Secara garis besar, Taliban merupakan pergerakan yang dilakukan oleh murid-murid Madrasah yang terdapat di Afghanistan. Gerakan ini pada awalnya didirikan oleh Mullah Muhammad Omar Akhund, Mulvi Abduls Samad, dan Mullah Abdul Sattar Akhund dengan tujuan untuk mensucikan masyarakat dari kelompok – kelompok bersenjata di Afghanistan. Mereka mendirikan gerakan ini pasca melihat tragedi yang melanda sebuah Keluarga Herati yang dibunuh di suatu pos penjagaan pada tanggal 20 September 1994.² Taliban menjadi sorotan masyarakat internasional ketika kantor berita BBC meliput adanya pergerakan baru di Afghanistan.

Untuk memahami lebih dalam tentang pergerakan Taliban, kita harus mengenal lebih dalam karakteristik dari pergerakan ini. Secara etnis Taliban terdiri atas suku Pashtun dari konfederasi Ghilzai dan suku Kakar dari konfederasi Ghurghust. Gerakan Taliban sendiri bukan gerakan yang mengutamakan kesukuan namun sebagian besar dari pemimpin senior di Taliban berasal dari suku Hotaki Ghilzai; dan anggota dari suku lainnya seperti Kakar Ghurghusht merupakan individu yang memiliki kedekatan dengan Mullah Omar.³ Konsepsi Islam Taliban dipengaruhi oleh konsep *Deobandi Islam*; sebuah ideologi Islam konservatif yang cenderung ortodoks. Sesuai dengan

² *Ibid*, hlm.36

³ *Ibid*, hlm.78

pandangan Deobandis, Taliban memiliki sentimen anti-Shi'a yang kuat dan memandang mereka setara dengan non-muslim.⁴

Pergerakan Taliban mengalami perkembangan perubahan besar pasca dipimpin oleh *Mullah Muhammad Omar Akhund* pada tahun 1994. Taliban pimpinan Mullah Omar lahir dari perang sipil pasca penarikan pasukan Soviet pada 1989. Sebelum lahirnya Taliban, perlawanan melawan Soviet dilakukan oleh kepala klan, suku, dan Ulama; bukan berbentuk *Jihad* ideologis yang dipimpin oleh Islamis.⁵ Hal tersebut memunculkan kekacauan yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan oleh klan dan suku tertentu.

Taliban melakukan serangan pertamanya di posko daerah Daro Khan. Penyerangan tersebut berjalan dengan lancar dan berita kemenangan kelompok Mullah Omar menyebar ke seluruh kelompok bersenjata di daerah sekitar Kandahar dan para milisi tersebut meninggalkan posko mereka beserta seluruh persenjataannya dalam rangka melarikan diri. Dengan persenjataan hasil rampasan Taliban di posko-posko kelompok bersenjata, mereka berhasil menduduki kota Kandahar ketika Mullah Naqib, komandan kelompok bersenjata di Kandahar dengan 2500 pasukan menyerah tanpa perlawanan.⁶ Setelah menduduki Kandahar, mereka bergerak kearah utara menuju Kabul dimana para milisi lokal menyerah kepada Taliban.

⁴ *Ibid*, hlm.76

⁵ Dr. Qamar Fatima, *The Rise and Fall of Taliban Regime (1994-2001) In Afghanistan: The Internal Dynamics*, (IOSR Journal of Humanities and Social Science, 2014), Vol.19, Issue 1, Ver.1, hlm.35

⁶ *Ibid*.

Pada Januari 1995, mereka berhasil mengamankan wilayah lembah Helmand setelah melakukan kontak senjata dengan para milisi. Taliban kemudian berhasil mendapatkan Provinsi Ghazani ketika Mullah Abdul Salam menyerah dan memberikan wilayah serta persenjataan mereka. Kelanjutan dari kemenangan di Provinsi Ghazani adalah keberhasilan Taliban dalam mendapatkan posisi strategis di Hikmatyar pada wilayah Chaharsayab dan Maidanshahr yang terletak di luar kota Kabul.⁷ Pada tanggal 27 September 1996, Kelompok pimpinan Mullah Omar berhasil menduduki wilayah Kabul, Ibu Kota Afghanistan tanpa perlawanan. *Griffin Michael*, dalam bukunya yang berjudul *Reaping the Whirlwind: Taliban Movement in Afghanistan* menganalisa bahwa kemenangan Taliban tanpa perlawanan di Kabul disebabkan oleh *strategic checkmate*.

Dalam pergerakan menuju wilayah Kabul, kelompok Taliban melewati dan menduduki wilayah Jalalabad. Pada wilayah tersebut, pemimpin milisi lokal sedang memberikan perlindungan dan menampung pejuang yang merupakan salah seorang pemimpin Mujahidin di era pendudukan Soviet yang baru saja diusir dari Sudan yakni Osama Bin Laden. Ketika Taliban menduduki Jalalabad, mereka mengambil alih perlindungan terhadap Osama dan kelompoknya. Setelah Mullah Omar mengayomi Osama, ia menjadi penghubung Taliban dengan dunia Muslim dikarenakan tujuan dan ketenarannya dalam melawan negara-negara barat termasuk melalui aksi pemboman

⁷ *Ibid*, hlm.39

terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Tanzania dan Kenya. Osama kemudian secara publik menyatakan dukungan penuh terhadap Mullah Omar.⁸

Pada awalnya, Amerika Serikat memilih jalan diplomasi melalui negosiasi dengan pemerintahan Taliban di Afghanistan agar mereka tidak memberikan suaka bagi kelompok teroris. Hubungan antara AS dengan Taliban mulai memburuk ketika kejadian 9/11 menyerang AS. Pemerintahan George W. Bush kemudian memberikan ultimatum terhadap Taliban yaitu pilihan diantara penyerahan Osama Bin Laden kepada AS atau acaman serangan AS terhadap Taliban. Karena pihak Taliban menolak untuk menyerahkan Osama, pada 7 Oktober 2001 pasukan milisi *Aliansi Utara* dan Amerika Serikat melakukan invasi ke Afghanistan dan memukul mundur Taliban hingga ke wilayah perbatasan dengan Pakistan.

Dalam pertemuan di Bonn, pemimpin dari *Council of Afghan* yaitu Hamid Karzai ditunjuk sebagai pemimpin dari pemerintahan sementara di Afghanistan yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Taliban di Afghanistan.⁹ Taliban kemudian secara efektif bergerak sebagai kelompok pemberontak yang ingin mengembalikan kekuasaan kepada pihak mereka dan memulai operasi-operasinya dari wilayah perbatasan Pakistan. Amerika Serikat bersama dengan ISAF dan pemerintahan Afghanistan

⁸ Alex Strick van Linschoten dan Felix Kuehn, *Seperating the Taliban from Al-Qaeda: The Core of Success in Afghanistan*, (New York: New York University, Center on International Cooperation, 2011), hlm.4

⁹ *Ibid*, hlm.45

bekerja sama untuk melakukan upaya kontra-insurgensi yang masih berlangsung hingga saat ini.

Setelah menggulingkan pemerintahan Taliban Afghanistan, Pemerintahan Bush dan mitra internasional AS dalam *Global War on Terror* memutuskan untuk membangun pemerintahan pusat yang demokratis dan kuat di Afghanistan. Usaha ini kemudian dikenal sebagai “*Nation Building*” yang didukung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Terpukul mundur dari Afghanistan kearah perbatasan Pakistan, Taliban memulai upaya insurgensi dengan tujuan mengambil kembali alih pemerintahan Afghanistan. Pada tahun 2003 hingga pertengahan 2006, pasukan AS dan Afghanistan menghadapi serangan kecil dari kekerasan insurgensi yang berfokus pada wilayah selatan dan timur dimana etnis suku Pashtun menjadi mayoritas.

Presensi pasukan AS dan sekutunya meningkat dari sebesar 30,000 pasukan sejak tahun 2006 menjadi 39,000 pasukan pada tahun 2009. Dinamika ini membuat militer AS dan NATO memulai mengulas strategi mereka dan pada tahun 2008, Admiral Mike Mullen sebagai kepala *Joint Chief of Staff* angkatan bersenjata AS menyatakan “*I’m not sure we’re winning*” secara publik tentang Afghanistan.¹⁰ Pengulasan strategi oleh AS dan NATO juga bertepatan dengan pergantian pemerintahan administrasi George W. Bush kepada Barrack Obama.

¹⁰ *Ibid.*

Secara sosial-politik, Taliban tidak hanya mengandalkan dinamika politik kesukuan untuk mendapatkan kekuatan namun juga mengandalkan karisma dari Mullah yang memimpin pergerakan. Masuknya Mullah Omar dalam Taliban merupakan sebuah pergerakan *politico-religious* yang menjadi tumpuan semangat pergerakan. Dalam politik internal pun, kekuasaan pada Taliban secara eksklusif terpusat pada Mullah Omar, dan bukan pada politik tradisional Pashtun yang berbentuk *shura* (konsensus). Mullah Omar secara langsung membuat seluruh keputusan besar yang akan dijalankan oleh Taliban tanpa ada persetujuan secara internal. Hal ini membuat keunikan pada pergerakan Taliban yang memiliki pusat gravitasi gerakan yang dalam istilah *Clausewitzian* tidak terletak pada masyarakat, pasukan milisi, maupun ulama-ulama sekalipun. *Center of Gravity* dari gerakan Taliban adalah Mullah Omar dan hanya Mullah Omar.

Operasi “*Enduring Freedom*” (*OEF*) dilaksanakan dengan tujuan menghentikan Afghanistan menjadi basis operasi terorisme internasional dan mengakhiri rezim Taliban pasca penolakan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden kepada AS. Menurut Donald Rumsfeld (Sekretaris Pertahanan AS pada saat itu) berbeda dengan persiapan pelaksanaan operasi militer di Iraq, persiapan Operasi *Enduring Freedom* dilaksanakan secara sangat padat; dengan mengacu pada transformasi pertahanan yang

bertumpu pada pemakaian teknologi dan persenjataan presisi didalam pengerahan pasukan darat konvensional dengan jumlah pasukan yang lebih kecil.¹¹

Hasil dari transformasi ini adalah bentuk invasi yang didominasi oleh serangan udara AS terhadap pasukan Taliban dan Al-Qaeda yang mempermudah pergerakan *U.S Special Operation Forces* dan operatif *Central Intelligence Agency* dalam menghancurkan musuh. Pasukan pemukul utama merupakan aliansi utara Afghanistan dan pasukan Anti-Taliban Pashtun. 1,300 Marinir juga dikerahkan untuk menekan posisi Taliban di Kandahar; namun secara keseluruhan pertempuran antara pasukan AS dan Taliban jarang terjadi.¹² Setelah Barrack Obama dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, ia mengumumkan penambahan 30,000 pasukan AS untuk memperkuat ANDSF dan mulai bulan Juli 2011 akan ada transisi pada kepemimpinan pasukan keamanan Afghanistan. Pemerintahan Afghanistan pun memaparkan status keamanan pemerintahannya yang menunjukkan bahwa pemerintahan Afghanistan hanya menguasai sebesar 30% dari total wilayah.

Laporan akan pemerintahan bayangan Taliban pun muncul di 33 dari 34 provinsi di Afghanistan.¹³ Hingga akhir pemerintahan Presiden Barrack Obama, pihak anti-pemerintahan menguasai 40% wilayah Afghanistan dan Taliban masih melakukan serangan juga kemajuan dalam pengembangan wilayah. Sementara itu Amerika Serikat

¹¹ Catherine Dale, *War in Afghanistan: Strategy, Operations, and Issues for Congress*, (Washington D.C: Congressional Research Service, 2011), hlm.4

¹² Kenneth Katzman dan Clayton Thomas, *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy*, (Washington D.C: Congressional Research Service, 2017), hlm.7

¹³ Ibid, hlm.24

telah mengeluarkan lebih dari \$783 Milyar dan masih menempatkan sekitar 9,800 tentara AS di Afghanistan.¹⁴

1.2 Identifikasi Masalah

Timbulnya permasalahan utama Amerika Serikat di Afghanistan bukan pada saat Invasi tahun 2001 melainkan pasca kelompok Aliansi Utara yang didukung AS berhasil menggulingkan pemerintahan Taliban. Kesuksesan diawal perang berubah menjadi situasi insurgensi ketika Taliban dan kelompok lainnya menarik mundur pasukan dan organisasi mereka dari lingkaran pemerintahan dan memulai aktivitas insurgensi untuk kembali mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Aktivitas insurgensi yang dimulai pada tahun 2002 berkembang menjadi perang bersenjata antara Republik Islam Afghanistan dengan pemberontak Taliban pada tahun 2006.¹⁵ Angka kekerasan naik secara drastis dan perebutan wilayah kekuasaan menjadi permasalahan yang dihadapi Afghanistan.

Amerika Serikat dengan berpegang kepada kepentingan nasionalnya yang bertujuan untuk menciptakan yang Afghanistan bersih dari sarana berlindung kelompok teroris secara aktif mendukung pemerintahan Afghanistan dalam upayanya melakukan operasi kontrainsurgensi. Baik secara ekonomi maupun militer, pemerintahan Afghanistan dengan AS menjalin kerjasama untuk membangun

¹⁴ Neta C. Crawford, *Us Budgetary Costs of Wars through 2016: \$4.79 Trillion and Counting: Summary of Costs of the US Wars in Iraq, Syria, Afghanistan and Pakistan and Homeland Security*, (Watson Institute of International & Public Affairs, 2016), hlm.7

¹⁵ Seth G. Jones, *The Rise of Afghanistan's Insurgency: State Failure and Jihad*. (International Security, 2008), hlm.7

kepercayaan masyarakat dan mengalahkan gerakan insurgensi khususnya Taliban. Namun sesuai dengan konsep peperangan insurgensi, semakin lama perang berlangsung membuat pemerintahan Afghanistan semakin rentan juga membutuhkan dana dan tenaga yang lebih bagi AS untuk mencoba mengalahkan insurgensi.

Hingga tahun 2014 Amerika Serikat telah menggelontorkan dana lebih dari US\$ 685 Milyar kepada Afghanistan¹⁶ dan sebanyak 2,297 pasukan AS tewas secara langsung maupun tidak langsung sejak tahun 2001 hingga 2017. Maka dari itu, strategi untuk membebaskan Afghanistan dari cengkraman insurgensi khususnya Taliban menjadi krusial bagi AS. Pada tahun 2002, AS mengeluarkan kebijakan yang berjudul *Afghanistan Freedom Support Act* yang dilegalisir oleh kongres. Penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana strategi ini bekerja dan hasil apa yang didapat dari strategi ini sebagai upaya dalam perihal peredaman insurgensi Taliban di Afghanistan.

Untuk membantu penulis dalam proses penelitian, penulis memutuskan untuk mengerucutkan arti dari Insurgensi. Menurut doktrin militer milik Britania Raya yang juga digunakan oleh NATO dan AS, insurgensi diartikan sebagai “sebuah pergerakan teroganisir yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melalui penggunaan subversi dan konflik bersenjata”.¹⁷ Selanjutnya penulis akan menggunakan definisi ini dalam pengartian. Penulis memilih definisi ini karena

¹⁶ Amy Belasco, *The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11*, (Washington D.C: Congressional Research Service, 2014), hlm.19

¹⁷ Joanna Spear, “Counterinsurgency”, dalam Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction*, (Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013) hlm. 393

kedepannya pembahasan insurgensi khususnya Taliban akan banyak menggunakan kacamata pemerintahan AS. Maka dari itu, penulis merasa untuk sepenuhnya menghindari miskonsepsi antara laporan atau data yang didapat dari pemerintahan AS dengan konsepsi penulis, maka penulis akan mengikuti definisi yang digunakan oleh AS dan NATO.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan kebijakan dan kerangka teoretis agar penelitian bersifat tepat pada sasaran dan memenuhi tujuan penelitian. Penulis berfokus pada kebijakan *Afghanistan Freedom Support Act* beserta amandemennya sebagai fokus utama kajian. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai rangka bantuan yang diberikan oleh AS untuk membangun dan mengamankan Afghanistan dari insurgensi.

Secara waktu, penulis juga membatasi penelitian dengan mengambil periode tahun 2003-2006. Hal tersebut dikarenakan strategi pertahanan nasional AS dibentuk sesuai dengan masa waktu kepresidenan. Periode tersebut juga merupakan masa berlaku dari AFSA.

Secara kerangka teoretis, penelitian dibatasi oleh pandangan teori Realisme khususnya Realisme Klasik. Hal tersebut membuat fokus utama dari penelitian berpusat pada kepentingan nasional dari AS dan perjuangan mereka dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan pertanyaan dari penelitian adalah *Bagaimana implementasi asistensi militer Amerika Serikat terhadap Republik Islam Afghanistan pada kebijakan Afghanistan Freedom Support Act dalam meredam pergerakan insurgensi Taliban di Afghanistan?*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengimplementasian asistensi militer Amerika Serikat terhadap Republik Islam Afghanistan pada kebijakan *Afghanistan Freedom Support Act* dalam meredam pergerakan insurgensi Taliban di Afghanistan. Penulis meyakini bahwa kontrainsurgensi yang merupakan perang non-konvensional belum mendapatkan perhatian yang cukup khususnya dari kalangan akademisi, dan peran asistensi militer dalam perang non-konvensional oleh aktor negara juga masih dapat didalami secara akademis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kekosongan dari literatur yang telah dibaca dan dijadikan penulis sebagai bahan acuan penelitian. Dalam bacaan *The Nio-Taliban, Counterinsurgency & The American Endgame in Afghanistan* karya Shehzad H. Qazi, dipaparkan tentang strategi *survival* dari pergerakan Taliban di Afghanistan dan bagaimana upaya AS bersama dengan RIA mencoba untuk meredam insurgensi Taliban khususnya dari sisi militer. Namun, literatur ini tidak membahas

mengenai peran strategi AS khususnya hubungan antara kepentingan nasional AS, strategi, dengan implementasi di lapangan. Sama halnya dengan bacaan sebelumnya, jurnal *The Afghan national Army: Marching in the Wrong Direction* karya Antonio Giustozzi membahas secara spesifik mengenai perkembangan militer di Afghanistan namun tidak membahas peran dari asistensi militer oleh AS secara spesifik. Maka dari itu, penulis merasa kajian ini dapat melengkapi literatur – literatur sebelumnya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan sebuah gambaran tentang dinamika antara Insurgensi dan Kontra-Insurgensi, dan bagaimana sebuah kelompok insurgensi dapat bertahan dibawah tekanan dari kekuatan lainnya. Dari hasil penelitian ini, dapat dipelajari pola pergerakan kelompok Taliban, yang merupakan kelompok Insurgensi yang dapat bertahan dibawah tekanan dari AS dan ISAF selama 16 Tahun dan menguasai lebih dari 40% wilayah Afghanistan.

Bagi pembuat kebijakan dan akademisi, pemahaman akan pergerakan Insurgensi Taliban dapat menjadi acuan untuk mempelajari bagaimana sebuah kelompok Insurgensi dapat bertahan dan melancarkan serangan, juga memberikan gambaran tentang operasi - operasi kontra-insurgensi yang telah dilancarkan oleh Amerika Serikat dan hasil dari operasi tersebut terhadap pergerakan Insurgensi.

1.4 Kajian Literatur

Dalam membuat tulisan, penulis menggunakan tiga literatur utama yang didukung oleh literatur lainnya sebagai referensi penulis untuk memahami pergerakan Taliban dan asistensi militer yang diberikan oleh Amerika Serikat:

The Neo-Taliban, Counterinsurgency & The American Endgame in Afghanistan (Shehzad H. Qazi, Institute for Social Policy and Understanding, 2011)

Karya ilmiah ini membahas mengenai pergerakan Neo-Taliban (kelompok insurgen Taliban pasca invasi tahun 2001), kontrainsurgensi di Afghanistan, dan rekomendasi kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik di Republik Islam Afghanistan. Shehzad memulai laporannya dengan menjelaskan karakteristik kelompok Neo-Taliban yang kemudian secara detail membahas mengenai pergerakan mereka ke wilayah RIA. Selanjutnya, karya ilmiah ini membahas mengenai kontrainsurgensi di Afghanistan dengan sudut pandang yang kritis terhadap intervensi dan asistensi AS di Afghanistan. Terakhir, karya ilmiah ini membahas mengenai prakiraan akhir dari konflik Afghanistan termasuk peran militer AS yang disebut sebagai pemeran penting dari akhir konflik insurgensi.

Dalam kasus asistensi militer AS di Afghanistan Shehzad kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan AS. Laporan ini mendeskripsikan intervensi militer AS sebagai sebuah ‘kegagalan’ dan AS dideskripsikan telah ‘menelantarkan’ pemerintahan RIA dalam perlawanan mereka di Afghanistan. Argumen yang dibangun dalam laporan ini adalah intervensi militer AS di Afghanistan merupakan sebuah

kegagalan dan pemerintahan RIA melakukan banyak pelanggaran HAM sehingga legitimasi pemerintahan mereka tidak diakui oleh masyarakat. Dari argument tersebut, Shehzad kemudian menjelaskan pergerakan Neo-Taliban yang memanfaatkan kekecewaan masyarakat sebagai momentum bagi pergerakan mereka.

Afghanistan: Post Taliban Governance, Security and U.S. Policy (Kenneth Katzman, Congressional Research Service, 2017)

Laporan untuk kongres yang dibangun oleh Kenneth Katzman memberikan gambaran bagi peneliti mengenai progress yang terjadi di Afghanistan pasca intervensi militer AS pada tahun 2001. Penelitian ini secara deskriptif menjelaskan mulai dari latar belakang masuknya AS kedalam ranah sosial politik Afghanistan, aktor – aktor yang ada dalam konflik di RIA, dan posisi AS beserta kebijakan yang dijalankan di Afghanistan. Laporan ini berfokus kepada kebijakan yang dijalankan AS di Afghanistan dan perkembangan kondisi di lapangan pasca pengimplementasian kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan asistensi militer AS di Afghanistan, Katzman tidak memberikan penilaian atau opini pribadi secara eksplisit didalam laporan. Penjelasan Katzman bersifat netral, namun cukup optimistis dalam masa depan Afghanistan dengan asistensi AS. Laporan ini hanya memberikan penjelasan mengenai perkembangan konflik dan kebijakan yang dijalankan oleh AS. Data yang ada dalam laporan ini kerap disandingkan dengan indikator-indikator agar dapat memberikan

gambaran mengenai kondisi keamanan Republik Islam Afghanistan pasca intervensi AS.

The Afghan National Army: Marching in the Wrong Direction? (Antonio Giustozzi, Afghanistan Analysts Network, 2007)

Jurnal yang dibentuk oleh Giustozzi menjelaskan mengenai transformasi dari ANA dari tahun 2002 hingga tahun 2007. Penelitian ini secara komprehensif menggambarkan pembentukan ANA oleh pemerintahan RIA yang dibantu oleh ISAF, dan perkembangannya hingga menjadi tulang punggung dari penjaga keamanan RIA. Penelitian ini lebih berfokus kepada militer Afghanistan, dan tidak berfokus kepada pihak luar termasuk presensi AS. Dalam penelitiannya Giustozzi menilai bahwa ANA dibangun dengan metode yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ancaman yang ada, sehingga ANA tumbuh menjadi organisasi militer yang tidak efektif.

Berkaitan dengan asistensi militer AS di Afghanistan, Giustozzi memberikan highlight pada pelatihan militer yang diberikan oleh militer AS kepada ANA yang kurang tepat. Giustozzi juga menjelaskan bahwa anggota rekrut dari militer RIA tidak memiliki tingkat pendidikan dan kapasitas yang cukup ketika bergabung dengan ANA sehingga kualitas dari anggota militer ANA dinilai buruk. Namun, penelitian ini tidak membahas secara detil mengenai bantuan lainnya dari AS dan komunitas internasional seperti persenjataan dan logistic tempur, sehingga secara keseluruhan perkembangan kapabilitas militer belum dapat dilihat dari penelitian ini.

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggabungkan sudut pandang dari ketiga literatur diatas untuk membentuk sudut pandang tersendiri yang independen. Pembahasan mengenai asistensi militer AS di Afghanistan dalam karya ilmiah ini akan mengambil sudut pandang yang netral seperti laporan dari Katzman, namun dalam perkembangan kapabilitas militer ANA penulis menggunakan sudut pandang kritis yang digunakan oleh Giustozzi. Penulis juga akan menempatkan posisi karya ilmiah ini sejajar dengan sudut pandang Qazi untuk memahami pergerakan Taliban di Afghanistan. Karya ilmiah ini juga akan memiliki sudut pandang yang independen dibandingkan ketiga literatur diatas; dikarenakan penulis memfokuskan penelitian pada kebijakan AFSA, sementara literatur-literatur yang ada tidak memiliki fokus kebijakan tersendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk meneliti dan memahami secara komprehensif akan pelaksanaan kebijakan strategis AS beserta programnya, peneliti mengambil beberapa teori dan paradigma ilmu hubungan internasional sebagai penuntun penulisan. Secara garis besar, penulis akan menggunakan teori *Counterinsurgency* yang dikembangkan oleh David Galula sebagai kerangka pemikiran utama. David Galula merumuskan bagaimana sebuah perang insurgensi berlangsung dan bentuk dari operasi kontrainsurgensi beserta strategi yang harus dibangun untuk mencapai kemenangan. Empat hukum utama peperangan kontrainsurgensi juga dibentuk oleh Galula untuk memahami dan membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi anti-insurgensi. Sebagai

paradigma berfikir, penulis menggunakan realisme klasik untuk menjelaskan tindakan AS didalam Afghanistan. Konsep *National Interest* menjadi pemahaman utama penulis dalam menjelaskan sebab dan tujuan AS di Afghanistan. Selain itu, dua teori pembantu yaitu *Strategic Theory* yang dirumuskan oleh H.R. Yarger, dan *Insurgency Warfare* yang juga dibentuk oleh Galula, akan membangun kerangka berfikir penulis.

Sebagai paradigma, Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Hans Morgenthau dalam tulisannya yang berjudul *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* menjelaskan mengenai perilaku politik dan sifat dasar dari manusia yang memiliki hasrat akan kekuasaan dan pengaruh (*power*). Paradigma ini menjelaskan sikap konfliktual manusia itu sendiri. Maka dari itu, negara selalu mencoba untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan mereka untuk memiliki pengaruh terhadap negara lain. Paradigma Realisme Klasik memandang bahwa negara akan menjalankan kebijakan dan strategi secara rasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya setelah melalui pertimbangan akan *cost and benefit* dari opsi – opsi kebijakan yang mereka miliki.¹⁸

Dalam *Politics Among Nations*, terdapat enam poin utama yang menjadi prinsip dari realisme politik. Berkaitan dengan kajian yang dibahas, peneliti akan menekankan secara khusus pada tiga poin pertama yang berhubungan langsung dengan proses penelitian. Yang pertama ialah poin kesatu dari tulisan ini yang mengemukakan bahwa

¹⁸ Colin Elman, “Realism”, dalam Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction*”, (Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013) hlm. 17

Realisme percaya bahwa politik diatur oleh seperangkat peraturan/hukum yang berasal dari sifat dasar manusia. Menurut pandangan Realisme, kita harus mempercayai adanya hukum dan aturan yang bersifat obyektif dalam hubungan politik. Teori politik dianggap harus diuji melalui pemahaman (*reasoning*) dan pengalaman (*experience*) dan teori tidak lekang oleh waktu. Teori ini berasumsi bahwa sifat dari kebijakan luar negeri dapat ditelaah melalui penelitian terhadap kebijakan politik yang dilakukan serta konsekuensi dari kebijakan tersebut. Setelah melakukan penelaahan tersebut barulah kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya pembuat kebijakan tersebut lakukan.¹⁹ Kesimpulannya, kita harus meletakkan posisi kita sebagai pembuat atau pihak yang memutuskan kebijakan yang sedang mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam keadaan tertentu (dengan anggapan bahwa aktor tersebut rasional).

Prinsip kedua menyatakan bahwa ciri utama dari realisme adalah konsep kepentingan (*interest*) yang didefinisikan sebagai kekuasaan (*power*). Realisme menyatakan bahwa politik berdiri sendiri dan terpisah dengan bidang lain seperti ekonomi, etika, atau agama. Tanpa adanya konsep seperti ini, teori politik baik itu domestik maupun internasional tidak dapat dipahami secara utuh, karena kita tidak dapat membedakan fakta politik dan non politik, ataupun mengukur tatanan sistem dari politik. Asumsi bahwa pengambil dan pembuat kebijakan berperilaku untuk mencapai kepentingan sebagaimana didefinisikan sebagai hasrat akan kekuasaan akan membantu

¹⁹ Hans Morgenthau dan Kenneth Thompson, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (New York: McGraw-Hill, 2006), hlm. 4

kita untuk mengetahui sebab dan akibat, juga proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan.²⁰

Pada prinsip ketiga dijelaskan bahwa Realisme berasumsi konsep utama dari kepentingan (*interest*) sebagai kekuasaan (*power*) adalah sebuah objektivitas yang valid secara universal, namun bukan berarti konsep ini bersifat tetap. Konsep dari kepentingan merupakan esensi dari politik dan tidak dipengaruhi oleh keadaan ruang dan waktu. Namun, jenis dari kepentingan mempengaruhi tindakan politik dalam suatu periode waktu ditentukan oleh konteks keadaan kultural dan politik pada saat kebijakan luar negeri tersebut sedang dibentuk. Realisme politik tidak menganggap kondisi kontemporer dimana kebijakan luar negeri tersebut beroperasi, tidak dapat berubah.²¹

Kepentingan nasional yang dibahas dalam realisme klasik kemudian dibagi dalam tingkatan-tingkatan tertentu oleh *Donald E. Nuechterlein*. Tingkatan tersebut dibuat sesuai dengan intensitas dari sebuah isu dan bagaimana negara memandangnya sebagai kepentingan mereka. Keempat tingkatan tersebut adalah: (1) *Survival Issues*; (2) *Vital Issues*; (3) *Major Issues*; dan (4) *Peripheral Issues*.²² *Survival Issues* merupakan kepentingan yang harus dipenuhi oleh negara karena berkaitan dengan eksistensi atau keamanan nasional negara tersebut. Sebagai contoh, ketika Jerman menginvasi Uni Soviet pada perang dunia ke-2, mempertahankan negara merupakan kepentingan

²⁰ *Ibid*, hlm.6

²¹ *Ibid*, hlm. 7

²²Edwin J. Arnold, Jr., "The Use of Military Power in Pursuit of National Interests," *Parameters*, 1994, 4, accessed April 30, 2018, <https://www.hsdl.org/?abstract&did=582>.

nasional yang harus dipenuhi dan invasi tersebut menjadi *Survival Issues* bagi Soviet. Pada tingkatan *Vital Issues*, negara mendapat ancaman dan negara dapat dirugikan atau dalam kondisi berbahaya apabila isu tersebut tidak diselesaikan. Kedua tingkatan tertinggi sangat memungkinkan keterlibatan militer secara aktif, sementara pada umumnya tingkatan *Major* dan *Peripheral Issues* tidak memerlukan keterlibatan militer secara langsung.²³

Selanjutnya, penulis menggunakan teori yang terdapat didalam buku *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book On Big Strategy* karya Yarger untuk mengupas kebijakan strategis AS di Afghanistan. Premis dasar penelitian yang dimiliki penulis, yaitu kebijakan strategis sebagai alat pemenuh kepentingan nasional, juga diambil dari penjelasan Yarger mengenai hubungan strategi dengan kebijakan. Dalam buku ini dijelaskan tingkatan dari strategi nasional, hubungan antara strategi dengan kebijakan, fungsi dari strategi, dan sifat dasar strategi yang nantinya akan membantu peneliti dalam menganalisa kebijakan strategis.

Dalam artian yang paling sederhana, strategi adalah kalkulasi dari tujuan, konsep, dan sumber daya dalam jangkauan resiko yang diarahkan untuk menciptakan hasil yang paling menguntungkan dibandingkan alternative lainnya.²⁴ H.R. Yarger mendefinisikan strategi pada level negara sebagai seni dan sains dalam mengembangkan dan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, sosial-psikologi, dan

²³ Ibid.

²⁴ Harry R. Yarger, *Strategic Theory For The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*, The Letort Papers(Carlisle,PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2006), hlm.1

militer milik negara untuk menciptakan efek yang melindungi atau memajukan kepentingan nasional di lingkungan internasional sesuai dengan arahan kebijakan. Strategi mencari sinergi dan simetri dari tujuan, konsep, dan sumberdaya untuk meningkatkan probabilitas dan konsekuensi yang menguntungkan demi mensukseskan kebijakan negara dan mengecilkan kemungkinan gagalnya sebuah kebijakan.²⁵

Pada tingkatan strategis tertinggi, negara memiliki kepentingan yang dikejarinya dengan seluruh kemampuan yang mereka punya melalui instrumenn – instrumen kekuatan. Kebijakan merefleksikan kepentingan ini dalam lingkungan strategis. Dalam mengejar kebijakan, negara akan menghadapi lawan dan aktor lainnya, sementara ada faktor-faktor lain yang diluar kontrol negara atau belum nampak. Secara teori strategi bergerak menciptakan kondisi yang paling menguntungkan bagi negara. Dalam aksinya, strategi memiliki logika inheren yang dapat dimengerti sebagai konstruksi teoretis dan diaplikasikan didalam pengembangan dan konsiderasi dalam menentukan strategi pada seluruh tingkatan.

Dalam menciptakan sebuah strategi, H.R. Yarger mendeskripsikan asumsi dan premis yang menjadi sifat dasar.²⁶ Pembentukan strategi berdasarkan atau memperhitungkan asumsi dan premis ini akan menghasilkan hasil yang baik dan dapat bertahan menghadapi keadaan yang ada. Premis dan asumsi tersebut berisi 15 poin yang menjelaskan hubungan strategi dengan keadaan, tingkatan hierarki strategi,

²⁵ *Ibid*, hlm.66

²⁶ *Ibid*, hlm. 68

hubungan pembuat strategi dengan aktor lainnya, sifat-sifat strategi, sinergitas, dan peran resiko dalam strategi.

Untuk menjelaskan definisi spesifik mengenai *Military Assistance / Military Aid*; penulis mengambil pengertian asistensi dari Jurnal "*Dependence, Military Assistance and Development*" karya John Hartmand dan Pamela Barnhouse Walters. Mereka mendeskripsikan asistensi militer sebagai penyerahan dana/logistik secara massif untuk kepentingan militer dan/atau beserta jasa konsultasi militer juga menempatkan pasukan "non-tempur" militer.²⁷ Namun, untuk memasukan AFSA kedalam kerangka pemikiran asistensi militer, penulis memasukan penempatan pasukan tempur dan pembangunan infrastruktur militer kedalam asistensi militer. Tujuan dari asistensi militer, menurut John Hartmand, dilakukan suatu negara untuk meningkatkan kapabilitas militer negara tujuan.

Pengerahan militer, penggunaan kekuatan militer, maupun peperangan secara umum merupakan sebuah kelanjutan kebijakan negara yang dipenuhi oleh cara-cara yang menggunakan elemen militer didalamnya. Mengutip Clausewitz dalam buku *On War*, "*War is merely the continuation of policy by other means*".²⁸ Penggunaan militer bukanlah sebuah kebijakan namun terusan dari hubungan politik intra atau antar negara. Dalam peperangan secara umum, pimpinan militer beserta jajarannya harus

²⁷ John Hartman and Pamela Barnhouse Walters, "Dependence, Military Assistance and Development: A Cross-National Study," *Politics & Society* 14, no. 4 (1985): , accessed March 26, 2018, <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003232928501400403?journalCode=pasa>.

²⁸ Carl Von Clausewitz et al., *On War* (New York: Oxford University Press, 2006). 28

membentuk sebuah kebijakan dan/atau operasi yang konsisten dengan tujuan politik yang dikejar. Tujuan politik adalah tujuan dari penggunaan militer, dan penggunaan militer adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.²⁹

Untuk lebih memahami pembahasan mengenai kebijakan asistensi militer, kita juga harus mendalami definisi dari kebijakan itu sendiri. Secara luas, kebijakan tidak memiliki definisi yang tetap, namun kita dapat mengambil benang merah dari penjelasan-penjelasan yang ada. Secara garis besar, kebijakan khususnya kebijakan pemerintahan adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah / pejabat publik yang diambil untuk kepentingan masyarakat / kelompok masyarakat.³⁰ Kebijakan dapat berbentuk hukum, regulasi, prosedur, kebijakan administrative atau insentif dari pemerintah atau instansi pemerintahan. Untuk membentuk sebuah kebijakan dibutuhkan sebuah proses yang dikenal sebagai *policymaking process*; langkah yang diambil oleh pembuat kebijakan secara umum terdiri dari lima poin besar. Poin tersebut adalah penentuan tujuan yang ingin dicapai; mengidentifikasi target dari tujuan; menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut; membentuk dan menjalankan program atau langkah spesifik yang dilakukan untuk mencapai tujuan; dan terakhir melakukan evaluasi akan aksi yang dijalankan untuk memperbaiki kebijakan.

Pemahaman mengenai kapabilitas militer juga dibutuhkan untuk meneliti peningkatan dan/atau perubahan dari kemampuan militer RIA secara keseluruhan

²⁹ Ibid hlm.29

³⁰ Sherri Torjman, *What Is Policy?* (Ottawa: Caledon Institute of Social Policy, 2005), 18.

maupun dalam menghadapi insurgensi. Penulis menggunakan konsep mengenai kapabilitas militer yang dikembangkan oleh *RAND Corporation* dan dicetuskan oleh Ashley J. Tellis. Secara garis besar, kapabilitas militer merupakan kemampuan militer untuk mempertahankan negara dari musuh dan menjalankan operasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.³¹ Kapabilitas militer suatu negara ditentukan oleh dua faktor besar yaitu *strategic resource* yang dimiliki, dan kemampuan dalam merubah sumber daya yang ada menjadi kemampuan tempur yang efektif.³² Sumber daya strategis yang berwujud fisik (Jumlah prajurit, anggaran, persenjataan, dsb.) bersamaan dengan kompetensi organisasional militer (pelatihan, doktrin, kualitas perwira, dsb.) merupakan *input* bagi kapabilitas militer suatu negara; sementara itu *output* yang dihasilkan adalah kemampuan dalam melakukan operasi militer.

Poin sumber daya strategis memperhitungkan sumber daya finansial, manusia, fisik dan teknologi dari organisasi militer suatu negara. Dana yang diberikan kepada organisasi militer merupakan alat ukur yang paling general untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi militer, yang diberikan oleh aktor politik negara tersebut. Besaran dana militer dan persentasi pengeluaran untuk pertahanan dari GDP/GNP bersifat essential dalam mengukur sumber daya strategis dan kapabilitas organisasi militer. Yang kedua, jumlah *manpower* dari organisasi militer juga mencerminkan kekuatan dan kapabilitas mereka. Tidak hanya secara kuantitas, namun

³¹ Ashley J. Tellis, *Measuring National Power in the Postindustrial Age* (Santa Monica, CA: RAND/Arroyo Center, 2000). 133

³² *Ibid.* 134

kualitas anggota militer seperti tingkat pendidikan perwira dan prajurit juga menjadi faktor penting dalam mengukur kemampuan organisasi militer dalam melaksanakan tugas mereka. Selanjutnya infrastruktur militer, institusi penelitian dan pengembangan militer, juga kehadiran industri militer dalam negeri mencerminkan kemampuan organisasi militer dalam melakukan operasi, mengembangkan kapabilitas, dan memproduksi senjata secara mandiri. Ketiga infrastruktur ini krusial untuk menopang militer secara organisasional. Tanpa adanya infrastruktur militer seperti fasilitas medis, lapangan tembak, dan pusat komando maka kemampuan tempur prajurit tidak akan maksimal. Terakhir, inventaris persenjataan militer juga bersifat krusial bagi kemampuan berperang suatu organisasi militer.³³ Ketika persenjataan yang memadai digabung dengan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten, maka kapabilitas militer dalam menjalankan suatu operasi akan jauh lebih baik dibandingkan dengan organisasi militer yang tidak didukung oleh persenjataan yang layak. Dalam analisa pada bab III, penulis akan memadukan konsep ini dengan data dari laporan pemerintahan AS dalam *U.S Government Accountability Office Report* dan laporan kongress yang menunjukan hibah dan jumlah personnel dari ANA.³⁴

Seluruh sumber daya strategis yang dimiliki suatu organisasi militer akan sia-sia tanpa kemampuan organisasional untuk merubah sumber daya tersebut menjadi suatu kekuatan yang mampu melakukan operasi secara efektif terhadap musuh. Dari berbagai

³³ Ibid. 141

³⁴ United States of America, Government Accountability Office, International Affairs and Trade, *Afghanistan Security: U.S.-Funded Equipment for the Afghan National Defense and Security Forces*, by Jessica Farb (Washington, D.C, 2017).

faktor yang mempengaruhi kapabilitas operasional, terdapat lima hal terpenting yang harus diperhitungkan yaitu: (1) Ancaman yang dihadapi negara dan strategi yang dikembangkan untuk menghadapi ancaman tersebut; (2) Hubungan militer dengan masyarakat sipil, termasuk hubungan dengan kepemimpinan nasional (pemerintahan); (3) Hubungan / kerjasama antar-militer dengan negara lain, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan; (4) Kualitas doktrin, pelatihan, dan struktur organisasi dalam militer; dan (5) kemampuan untuk beradaptasi dengan sifat ancaman yang dinamis baik secara strategis maupun operasional.³⁵

Untuk memenuhi situasi perang insurgensi penulis menggunakan konsep yang diprakarsai oleh David Galula. Konsep perang revolusioner dalam buku *“Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice”* yang ditulis oleh David Galula menjelaskan bukan tentang strategi perang revolusioner / gerilya, namun lebih membahas mengenai sifat dan situasi dari peperangan. Dalam bab mengenai perang revolusioner, Galula menjelaskan perbedaan antara perang insurgensi dengan perang konvensional dan bagaimana kemenangan dapat dicapai baik oleh pihak insurgen (pemberontak), maupun kontrainsurgen (pemerintah). Selama membahas mengenai buku Galula, selanjutnya penulis akan mengartikan insurgen/pemberontak sebagai pihak yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dan kontrainsurgen/pemerintah sebagai pihak yang mempertahankan kekuasaan untuk kemudahan penulisan.

³⁵ Ashley J. Tellis, *Measuring National Power in the Postindustrial Age* (Santa Monica, CA: RAND/Arroyo Center, 2000). 144

Penulis menggunakan konsep-konsep perang revolusioner yang diprakarsai oleh Galula untuk mengidentifikasi situasi peperangan yang ada di Afghanistan. Selama penelitian, dibutuhkan gambaran akan kondisi konflik yang membentuk perilaku dan strategi dari kedua belah pihak. Pemahaman akan sifat perang insurgensi akan membantu analisa dalam perencanaan, pengimplementasian, dan dampak dari kebijakan strategi AS di Afghanistan.

Mengutip dari *Clausewitz*, Galula mengartikan insurgensi sebagai upaya mencapai sebuah kebijakan oleh suatu pihak yang berasal didalam sebuah negara dengan cara apapun. Insurgensi merupakan sebuah *protracted struggle* yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang ada.³⁶

Sifat pertama yang ditelaah oleh Galula adalah sifat asimetris antara insurgen dan kontrainsurgen. Dalam perang insurgensi, terdapat sifat asimetris yang disebabkan oleh sifat dasar perang, yaitu perbedaan proporsional kekuatan antara kedua belah pihak, dan perbedaan dari keunggulan (*asset*) dan kelemahan (*liabilities*) tiap kubu. Bagi Insurgen, mereka memiliki keunggulan inisiatif strategis. Insurgen memiliki kebebasan untuk memilih waktu dan tempat untuk menyerang, dan menunggu saat menyerang hingga situasi menguntungkan bagi mereka kecuali ada faktor eksternal yang memaksa mereka untuk melancarkan serangan.³⁷ Bagi kontra-insurgen, mereka memiliki superioritas dalam aset. Sebuah pemerintahan yang berdaulat, secara teknis memiliki

³⁶ David Galula and John A. Nagl, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, Psi Classics of the Counterinsurgency Era (Westport, CT: Praeger Security International, 2006.), hlm.2

³⁷ *Ibid*, hlm.3

segalanya. Pengakuan diplomatis, kekuasaan pada lembaga negara, kontrol keamanan, financial resources, industry dan agrikultur hingga sarana propaganda dimiliki oleh insurgen. Mereka adalah negara ketika insurgen adalah pemberontak yang tidak memiliki asset-aset yang dimiliki oleh kontra-insurgen. Namun, Kontrainsurgen memiliki beban yang besar; mereka memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban diseluruh negara. Strategi dari insurgen biasanya adalah untuk mengubah asset yang bersifat tidak nyata (fisik) menjadi konkret sementara stratgi kontrainsurgen adalah mencegah beban mereka yang belum nyata menjadi konkret, dan menjaga asset mereka yang ada³⁸

Sifat berikutnya adalah populasi sebagai tujuan dari perang. Populasi merepresentasikan wilayah peperangan yang baru. Apabila insurgen dapat memisahkan antara masyarakat dengan kontrainsurgen, mengontrol mereka, mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka mereka akan memenangkan perang karena pada akhirnya, pengimplementasian kekuatan politik bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Maka dari itu, peperangan merebut masyarakat menjadi karakteristik utama dari perang revolusioner.³⁹ Hal ini diperkuat dengan buku *Guide To Analysis of Insurgency* yang dikeluarkan oleh pemerintahan AS yang mennyebutkan bahwa karakteristik dasar dari

³⁸ *Ibid*, hlm.4

³⁹ *Ibid*

insurgent adalah untuk menghancurkan kemampuan pemerintah dan mendapatkan *support* dari masyarakat.⁴⁰

Perang insurgensi juga memiliki sifat perang politis. Secara teori, seluruh perang adalah perjuangan untuk mencapai tujuan politis, walaupun dalam beberapa kasus keputusan akhir politis yang didapat berbeda jauh dari maksud awal. Namun dalam perang konvensional, aksi militer yang didampingi oleh diplomasi, propaganda, dan tekanan ekonomi adalah prinsip dari cara mencapai tujuan. Politik sebagai instrument perang tidak mendominasi peperangan dan baru muncul sebagai instrument pasca peperangan usai. Gambaran yang berbeda didapat dari perang revolusioner. Tujuan dari perang insurgensi adalah masyarakat itu sendiri. Operasi yang dijalankan didesign untuk memenangkan masyarakat (bagi insurgen) atau menjaga kepatuhan masyarakat pada pemerintahan (bagi kontrainsurgensi) adalah operasi yang memiliki sifat politis. Artinya, aksi politik menjadi esensial selama peperangan. Tidaklah cukup bagi pemerintahan untuk menetapkan tujuan politik dan menjalankan operasi berdasarkan tujuan tersebut, namun politik menjadi instrument aktif dalam operasi kontrainsurgensi.⁴¹

Karena memiliki sifat politis, dalam perang insurgensi legitimasi pemerintah memiliki peranan vital dalam dinamika peperangan. Semakin tinggi legitimasi

⁴⁰ United States of America, Central Intelligence Agency, *Guide to the Analysis of Insurgency* (Homeland Security Digital Library, 2012), hlm. 2

⁴¹ David Galula and John A. Nagl, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, Psi Classics of the Counterinsurgency Era (Westport, CT: Praeger Security International, 2006.), hlm.5

pemerintahan, maka dukungan bagi insurgen semakin kecil dan pergerakan insurgensi semakin melemah. Hal tersebut menyebabkan tingkat kekerasan yang terjadi di masyarakat akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah legitimasi pemerintahan, kelompok insurgen akan memiliki basis dukungan yang lebih besar, dan menyebabkan kemampuan bertempur mereka semakin tinggi yang menyebabkan meningkatnya tingkat kekerasan dalam masyarakat.⁴²

Sifat berikutnya adalah perang insurgensi merupakan perang yang berkepanjangan. Lamanya perang disebabkan dari pihak insurgen karena sifat awal mereka yang lemah. Dibutuhkan banyak waktu bagi sekelompok kecil pemimpin pemberontakan untuk menyusun pergerakan insurgensi, untuk membangun angkatan bersenjata, untuk mencapai titik seimbang dengan musuh, dan untuk menggulingkan mereka. Perang revolusioner akan berangsur secara cepat hanya ketika pihak kontrainsurgen runtuh pada tahap awal.⁴³

Selain sifat-sifat yang telah dijabarkan diatas, perang insurgensi memiliki ciri khas yaitu perbandingan sumber daya yang harus dikeluarkan oleh insurgen dan kontra insurgen yang timpang, sifat pemberontak yang fleksibel dan pemerintah yang kaku, peran ideologi yang dominan, penggunaan propaganda yang hanya dapat digunakan oleh insurgen, dan sifat inkonvensional perang insurgensi yang terus berangsur hingga

⁴² Stephen J. Flanagan dan James A. Schear, *Strategic Challenges Americas Global Security Agenda* (Dulles: Potomac Books Inc., 2014), hlm.27

⁴³ David Galula and John A. Nagl, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, Psi Classics of the Counterinsurgency Era (Westport, CT: Praeger Security International, 2006), hlm.5

akhir. Peran insurgensi juga memiliki karakteristik *fourth generation warfare* yang memiliki sifat desentralisasi, dan hilangnya negara sebagai pihak yang memonopoli peperangan. Pada perang insurgensi, sebagaimana juga dengan perang generasi keempat, negara dihadapkan pada *non-state actor* yang tidak mengikuti atau berperang secara konvensional.⁴⁴

Teori berikutnya diambil dari bab *hot revolutionary war* dari buku yang sama oleh Galula. Hot Revolutionary War adalah istilah yang digunakan ketika perlawanan terhadap pergerakan insurgensi sudah mencapai titik dimana penggunaan angkatan bersenjata tidak lagi dapat dihindari. Secara militer, Galula membagi pergerakan insurgensi menjadi dua fase yaitu *cold revolutionary war* dan *hot revolutionary war*. Kedua fase ini adalah sebuah kesatuan dalam teori kontrainsurgensi yang dikembangkan oleh Galula; namun agar teori yang digunakan lebih tepat guna, penulis akan berfokus pada bagian *hot revolutionary war*. Pada fase ini insurgen telah berhasil membangun basis organisasi pergerakan dan mulai beroperasi secara terbuka. Pada fase ini pihak pemerintahan telah menghadapi situasi yang tidak kondusif dengan kesetiaan masyarakat terhadap negara tidak lagi bersifat absolut. Sebaliknya, masyarakat mempertanyakan kesanggupan pemimpin dan kebijakan yang diambil untuk melindungi mereka. Struktur politik, yudisial, dan militer harus diubah untuk mengikuti situasi yang ada. Ekonomi negara memburuk sementara pengeluaran negara

⁴⁴ William S. Lind, "Understanding Fourth Generation War," *Military Review*, September/October 2004.

meningkat tajam dalam upayanya mengalahkan pemberontak. Dari gambaran situasi ini kita dapat menelaah sifat dan cara yang dapat ditempuh oleh pihak kontrainsurgen dalam hukum dan prinsip perang kontrainsurgensi.⁴⁵ Dalam buku panduan mendalami analisa insurgensi yang dibentuk oleh pemerintahan AS, fase insurgensi dibagi menjadi *Preinsurgency Stage*, *Incipient Conflict Stage*, *Open Insurgency Stage*, dan *Resolution Stage*. *Hot revolutionary warfare* Galula setara dengan *Incipient Conflict Stage* dan *Open Insurgency Stage* secara kondisi.⁴⁶

Galula juga membentuk hukum-hukum bagi operasi kontrainsurgensi yang harus dipahami untuk dapat memenangkan perang melawan insurgensi. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada hukum pertama, ketiga, dan keempat. Hukum pertama adalah dukungan masyarakat memiliki kepentingan yang sama bagi kontrainsurgen sebagaimana terhadap insurgen. Dukungan dari masyarakat dibutuhkan untuk menjaga wilayah agar tidak diduduki atau menjadi tempat perlindungan bagi pemberontak. Walaupun pemerintah dapat dengan mudah membubarkan organisasi pendukung pemberontak dan memberantas pasukan pemberontak dari suatu wilayah, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mencegah kembalinya pasukan gerilya pemberontak dan pembangunan sel insurgen tanpa kerjasama masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ David Galula and John A. Nagl, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, Psi Classics of the Counterinsurgency Era (Westport, CT: Praeger Security International, 2006), hlm.49

⁴⁶ United States of America, Central Intelligence Agency, *Guide to the Analysis of Insurgency* (Homeland Security Digital Library, 2012), hlm. 10

⁴⁷ David Galula and John A. Nagl, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, Psi Classics of the Counterinsurgency Era (Westport, CT: Praeger Security International, 2006.), hlm.52

Hukum ketiga, dukungan dari masyarakat bersifat kondisional (bersyarat). Ketika pemberontak telah terbentuk dan menguasai masyarakat suatu daerah, minoritas yang awalnya menentang mereka mulai diam dan pudar. Hal tersebut disebabkan minoritas tersebut mendapat tekanan dari insurgen baik itu secara fisik maupun psikologis. Minoritas tersebut kemudian melebur kepada mayoritas dan aktivisme mereka pudar. Minoritas ini tidak akan dapat muncul kembali untuk melawan insurgen kecuali apabila ancaman yang membayangi mereka hilang. Artinya, untuk melaksanakan aksi politik yang efektif keamanan masyarakat harus terjamin terlebih dahulu melalui operasi militer dan polisi. Reformasi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya akan menjadi tersendat bahkan gagal apabila dijalankan ketika insurgen masih mengontrol masyarakat⁴⁸ Dalam buku panduan analisa insurgensi, dituliskan bahwa *Government Leadership* dan *Security Force Effectiveness* merupakan bagian dari kunci kemenangan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ditulis juga bahwa *Popular Support* atau dukungan dari masyarakat merupakan kunci dari kemenangan bagi insurgen dan pemerintahan dalam menguasai wilayah.⁴⁹

Hukum keempat: *Intensity of Efforts and Vastness of Means Are Essential*. Operasi yang dilakukan untuk membenaskan masyarakat dari bahaya pemberontak dan meyakinkan bahwa pihak kontrainsurgen akan pada akhirnya memenangkan konflik memiliki sifat yang intensif dan waktu yang sangat lama. Mereka membutuhkan usaha,

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ United States of America, Central Intelligence Agency, Guide to the Analysis of Insurgency (Homeland Security Digital Library, 2012), hlm.11

sumber daya, dan personnel yang besar. Artinya usaha ini tidak bisa dilakukan diseluruh negara secara bersamaan namun diaplikasikan dari wilayah ke wilayah.⁵⁰

Seluruh elemen pada teori ini akan digunakan untuk membahas dasar-dasar dari perang kontrainsurgensi dan bagaimana sebaiknya strategi melawan insurgensi dibentuk. Penulis akan menggunakan hukum-hukum perang kontrainsurgensi untuk menganalisa penggunaan kekuatan militer untuk melawan pihak insurgen.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pergerakan Insurgensi Taliban, pemerintahan RIA dan Pemerintahan AS. Peneliti menggunakan literatur berupa buku, jurnal, dan laporan pemerintahan sebagai sumber yang akan dikaji, diantaranya buku *Against All Enemies: Inside the White Houses War on Terror: What Really Happened* karya Richard A Clarke, buku *The Taliban and the Crisis of Afghanistan*. Karya Robert D. Crews dan buku berjudul *The Taliban's Winning Strategy in Afghanistan* karya Gilles Dorronsoro. Penelitian akan bersifat deskriptif dan data akan digunakan sebagai dasar dan teori sebagai bahan penjelas. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjealskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data, dengan objek penelitian yang terbatas.

⁵⁰ David Galula and John A. Nagl, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, Psi Classics of the Counterinsurgency Era (Westport, CT: Praeger Security International, 2006.), hlm.55

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengkajian literature yang membahas mengenai Insurgensi Taliban dan kebijakan strategis AS di Afghanistan yaitu *Afghanistan Freedom Support Act*. Pengumpulan data atau sumber dilakukan dengan penelusuran dokumen-dokumen terkait dengan jawaban yang ingin dicari oleh peneliti. Dokumen yang digunakan diantaranya adalah *Afghanistan Freedom Support Act of 2002*, *Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004*, dan *The National Security Strategy of the United States of America*.

1.7 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis membagi bentuk penelitian menjadi tiga bagian besar yaitu pendahuluan, analisa, dan kesimpulan. Untuk mempermudah dan memperjelas penyajian, penulis menjabarkan kembali kedalam empat bab. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya peneliti mengurai pokok latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuan utama dari bab pertama adalah memberikan gambaran dan pemahaman dasar atas analisa penelitian yang dibahas. Seperti yang dapat dilihat pada halaman sebelumnya, penulis menggunakan literatur karya *David Galula*, *Ashley J. Tellis*, *Morgenthau*, *John Hartmand*, *H.R Yarger*, *Edwin J. Arnold*, dan literatur lainnya.

Dalam bab dua, peneliti membahas lebih dalam mengenai kepentingan nasional AS, Kebijakan Strategi AS, dan asistensi militer AS yang diberikan kepada RIA. Penjabaran mengenai Kebijakan Strategi AS akan diberikan untuk memberikan pengantar bagi bab berikutnya yang membahas mengenai hubungan antara pengimplementasian kebijakan strategis AS terhadap peredaman pergerakan insurgensi Taliban. Peneliti menggunakan data dari *National Security Strategy* yang dikeluarkan oleh pemerintahan George W. Bush, produk hukum berupa *Afghanistan Freedom Support Act* yang dibentuk oleh kongress dan senat AS, laporan *The Cost of Iraq, Afghanistan and Other Global War on Terror Operations Since 9/11* yang ditulis oleh Amy Belasco dalam Congressional Research Service, laporan tahunan *Afghanistan Current issues and US Policy* karya Kenneth Katzman, dan literature lainnya.

Pada bab ketiga, peneliti akan menyajikan pembahasan analisa mengenai penelitian dari hasil pengumpulan data berupa kajian pustaka yang telah dilakukan. Penyajian bab ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan bagaimana jalannya kebijakan AFSA dan asistensi militer dapat meredam insurgensi Taliban. Akan dibahas juga mengenai peran Republik Islam Afghanistan dalam konflik yang terjadi didalamnya. Penulis juga akan menjabarkan mengenai pergerakan insurgensi Taliban di Afghanistan dan hasil dari kebijakan AFSA sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan oleh pemerintahan AS. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan berbagai sumber

literature diantaranya buku *The Neo Taliban, Counterinsurgency and The Endgame in Afghanistan* karya Shehzad H. Qazi, data dari *Afghanistan Index* yang ditulis oleh Ian S. Livingston, Jurnal berjudul *Auxiliary Force or National Army? Afghanistans 'ANA' and the Counter Insurgency Effort, 2002-2006* karya Dr. Antonio Giustozzi, Buku *The Talibans Winning Strategy in Afghanistan* karya Gilles Dorronsoro, data dari *National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism*, dan literature lainnya. Kemudian, Pada bab terakhir yaitu bab empat, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta pembahasan dari hasil kesimpulan yang diberikan.